

Pembentukan Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Puskesmas Cikulur

Fathinah Ranggauni Hardy¹, Rafiah Maharani Pulungan², Putri Permatasari³

fathinahranggauni@upnvj.ac.id, rafiah.maharani@gmail.com, ppermatasari8@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl Raya Fatmawati, Kampus UPN Veteran Jakarta

Abstrak

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah masif terjadi gempa bumi selama 1 tahun terakhir. BNPB telah melaporkan terjadinya gempa bumi tektonik dengan kekuatan $M=6.1$ SR yang paling besar terjadi pada hari Selasa, 23 Januari 2018. Gempa tersebut terjadi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 43 km arah selatan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada kedalaman 61 km. Pusat gempa yang berada di darat atau dekat pantai menyebabkan guncangan keras dirasakan oleh masyarakat dan sampai saat ini disertai banyak gempa susulan (BNPB, 2018). Kecamatan Cikulur salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak yang memiliki kerusakan yang parah dan mengalami kerugian secara fisik yaitu Sebanyak 2.760 unit rumah rusak itu rinciannya 291 rumah rusak berat (RB), 575 rusak sedang (RS), dan 1.894 rusak ringan (RR) (BNPB, 2018) dan secara non fisik banyak warga yang mengalami trauma akibat kejadian gempa tersebut.

Kecamatan di Kabupaten Lebak juga belum memiliki upaya manajemen bencana berbasis masyarakat yang optimal, misalnya belum ada terbentuk Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 sesuai 20 Indikator Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, tim pengusul tertarik untuk membentuk inovasi berbasis masyarakat berupa Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Lebak yang inisiasi awal di Kecamatan Cikulur. Tujuan dari kegiatan adalah untuk membentuk Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Lebak berbasis masyarakat agar siap dala menghadapi bencana.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pembentukan Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 dan Simulasi di Wilayah Kerja Puskesmas Cikulur. Target Luaran dari PKM ini adalah terbentuknya Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19. Kegiatan menghasilkan pembentukan Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 dan Simulasi di Wilayah Kerja Puskesmas Cikulur.

Kata Kunci : Bencana, Pembentukan Tim Siaga, Lebak

Abstract

Lebak Regency, Banten Province is one of the regions in Indonesia that has experienced massive earthquakes over the last 1 year. BNPB has reported the occurrence of a tectonic earthquake with a magnitude of $M = 6.1$ on the Richter scale, the largest occurred on Tuesday, January 23, 2018. The earthquake occurred precisely at sea at a distance of 43 km south of Lebak Regency, Banten Province at a depth of 61 km. The epicenter of the earthquake that was on land or near the coast caused strong shaking felt by the community and has been accompanied by many aftershocks (BNPB, 2018). Cikulur sub-district is one of the sub-

districts in Lebak Regency which has severe damage and suffered physical losses, namely a total of 2,760 damaged houses, details of which 291 heavily damaged houses (RB), 575 moderately damaged hospitals, and 1,894 lightly damaged (RR) (BNPB, 2018) and non-physically many residents were traumatized by the earthquake.

The sub-districts in Lebak Regency also do not have optimal community-based disaster management efforts, for example there has not been a Disaster Preparedness Team during the Covid 19 Pandemic in accordance with the 20 Indicators of the Disaster Preparedness Team during the Covid 19 Pandemic. Based on these problems, the proposer team is interested in forming innovations. community-based in the form of the Disaster Preparedness Team during the Covid 19 Pandemic in Lebak Regency which was initiated initially in Cikulur District. The purpose of the activity is to form a community-based Disaster Preparedness Team during the Covid 19 Pandemic in Lebak Regency so that they are ready to face disasters.

Activities that will be carried out in the formation of the Disaster Preparedness Team during the Covid 19 Pandemic and Simulation in the Work Area of the Cikulur Health Center. The output target of this PKM is the formation of a Disaster Preparedness Team during the Covid 19 Pandemic. The activity resulted in the formation of a Disaster Preparedness Team during the Covid 19 Pandemic and Simulation in the Cikulur Health Center Work Area.

Keywords: Disaster, Formation of Alert Team, Lebak

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah masif terjadi gempa bumi selama 1 tahun terakhir. BNPB telah melaporkan terjadinya gempa bumi tektonik dengan kekuatan $M=6.1$ SR yang paling besar terjadi pada hari Selasa, 23 Januari 2018. Gempa tersebut terjadi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 43 km arah selatan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada kedalaman 61 km. Pusat gempa yang berada di darat atau dekat pantai menyebabkan guncangan keras dirasakan oleh masyarakat dan sampai saat ini disertai banyak gempa susulan (BNPB, 2018). Kecamatan Cikulur salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak yang memiliki kerusakan yang parah dan mengalami kerugian secara fisik yaitu Sebanyak 2.760 unit rumah rusak itu rinciannya 291 rumah rusak berat (RB), 575 rusak sedang (RS), dan 1.894 rusak ringan (RR) (BNPB, 2018) dan secara non fisik banyak warga yang mengalami trauma akibat kejadian gempa tersebut.

Kecamatan di Kabupaten Lebak juga belum memiliki upaya manajemen bencana berbasis masyarakat yang optimal, misalnya belum ada terbentuk Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 sesuai 20 Indikator Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, tim pengusul tertarik untuk membentuk inovasi berbasis masyarakat berupa Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Lebak yang inisiasi awal di Kecamatan Cikulur. Tujuan dari kegiatan adalah untuk membentuk Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Lebak berbasis masyarakat agar siap dalam menghadapi bencana. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pembentukan Tim Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 dan Simulasi di Wilayah Kerja Puskesmas Cikulur. Target Luaran dari PKM ini adalah terbentuknya Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19, artikel ilmiah yang dipresentasikan di Seminar Nasional & Gelar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas

Terbuka 2021 (Senmaster 2021). Artikel yang dimuat di Media Online, fikes.upnvj.ac.id.

2. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Istilah bencana biasanya mengacu pada keadaan alami, misalnya angin ribut atau gempa bumi yang dikaitkan dengan efek kerusakan yang ditimbulkannya misalnya hilangnya kehidupan atau kerusakan bangunan. Bahaya mengacu pada kejadian alami dan kerentanan mengacu pada kelemahan suatu populasi atau sistem terhadap pengaruh dari bahaya tersebut (Pan American Health Organization, 2000).

Bencana alam merupakan peristiwa yang luar biasa dan terjadi di berbagai belahan dunia. Dampak yang diakibatkan oleh bencana alam sungguh luar biasa pula bagi yang mengalaminya. Bahkan, bencana alam tertentu dapat menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit baik korban cedera maupun meninggal dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan akan bencana alam. Berbagai bencana alam telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dari tahun ketahun dan korbannya pun tidak sedikit. Bencana alam di Indonesia meliputi tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, abrasi pantai dan erosi.

Bencana alam tidak hanya menimbulkan korban fisik, akan tetapi berdampak juga pada gangguan psikologis dan trauma yang mendalam. Hilangnya harta benda dan nyawa dari orang-orang yang dicintainya, membuat sebagian korban mengalami stress dan gangguan kejiwaan. Mitigasi dan Kesiapsiagaan merupakan salah satu tahapan yang sangat vital dalam manajemen bencana. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara tepat, cepat, berdasarkan prioritas, koordinasi, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara keseluruhan berada pada posisi rawan bencana, baik bencana alam geologis maupun bencana alam yang diakibatkan ulah manusia. Selama 5 tahun terakhir telah terjadi bencana alam sebanyak 158.238 kasus meliputi bencana gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran hutan, kebakaran pemukiman, dan bencana alam lainnya, diantara bencana alam yang terjadi di Indonesia (BNPB, 2014).

Posisi geografis kepulauan Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik raksasa (Eruasia, India Australia dan Pasifik) dan terletak diantara Benua Asia dan Australia dan Samudera Hindia dan Pasifik serta terdiri dari ± 17.000 pulau yang sebagian besar berhadapan dengan laut lepas dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. Posisi geografis tersebut, menyebabkan Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi, terpengaruh gelombang pasang hingga tsunami serta cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor serta kekeringan.

Berdasarkan sejarah kebencanaan, terhimpun hampir semua bencana alam di dunia telah terjadi di Indonesia dan setiap terjadi bencana alam, setiap kali pula kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa (Hendrianto, 2012). Dampak kejadian bencana menyentuh seluruh bidang, baik ekonomi, sosial-budaya, politik, namun yang paling utama dirasakan adalah bidang

kesehatan. Disadari bahwa dengan adanya kejadian bencana, maka selalu timbul wabah penyakit yang merupakan dampak dari kondisi lingkungan yang rusak, sanitasi yang kurang, daya tahan tubuh manusia menurun drastis dan kurangnya sarana obat-obatan. Pelayanan kesehatan pada saat bencana merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian, kecacatan dan kejadian penyakit, karena bencana merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan biasanya terjadi secara mendadak serta disertai jatuhnya korban. Keadaan ini bila tidak ditangani secara cepat dan tepat dapat menghambat, mengganggu, serta menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat.

Upaya penanggulangan krisis akibat bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak sebelum terjadinya wabah dan bencana yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan, mitigasi (pelunakan/penjinakan dampak) dan kesiapsiagaan dalam menghadapi wabah dan bencana. Kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya wabah dan bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya wabah dan bencana berupa kegiatan pemulihan/rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu penanggulangan krisis akibat wabah dan bencana harus mempunyai suatu pemahaman permasalahan dan penyelesaian secara komprehensif, serta terkoordinasi secara lintas program dan lintas sektor. Sebagaimana kebijakan dan strategi nasional saat ini, upaya penanggulangan bencana lebih dititikberatkan pada upaya sebelum terjadinya bencana, yang salah satunya adalah kegiatan kesiapsiagaan. Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (pelatihan, gladi, penyiapan sarana dan prasarana, SDM, logistik dan pembiayaan). Dengan kesiapsiagaan yang tepat diharapkan upaya penanggulangan dapat lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan.

Pada penanggulangan bencana telah terjadi perubahan paradigma, dari penanganan bencana berubah menjadi pengurangan risiko bencana, artinya saat ini penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih menitikberatkan pada tahap pra bencana daripada tahap tanggap darurat (Raharja, Eddie, 2009). Kesiapsiagaan terhadap bencana ini harus dapat diantisipasi baik oleh unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam kesiapsiagaan krisis akibat bencana oleh pemerintah diperlukan upaya-upaya, mulai dari pengembangan peraturan peraturannya, penyiapan program, pendanaan dan pengembangan jejaring lembaga atau organisasi siaga bencana.

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah masif terjadi gempa bumi selama 1 tahun terakhir. BNPB telah melaporkan terjadinya gempa bumi tektonik dengan kekuatan $M=6.1$ SR yang paling besar terjadi pada hari Selasa, 23 Januari 2018, pukul 13:34:53 WIB, wilayah Samudera Hindia, Selatan Jawa. Gempa tersebut terjadi dengan koordinat episenter pada 7,23 LS dan 105,9 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 43 km arah selatan Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada kedalaman 61 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa yang berada di darat atau dekat pantai

menyebabkan guncangan keras dirasakan oleh masyarakat (BNPB, 2018).

Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh Peta tingkat guncangan (*shakemap*) BMKG menunjukkan bahwa dampak gempabumi berupa guncangan dirasakan di daerah Jakarta, Tangerang Selatan, Bogor antara IV-V MMI. Laporan dari BPBD dan Pusdalops BNPB menyebutkan bahwa gempa dirasakan sangat kuat di Provinsi Banten dan menyebabkan kepanikan. Sampai saat ini sudah tercatat sudah ada 53 kali gempa susulan dengan magnitudo yang lebih kecil. Data terkini BNPB sebelumnya menyatakan, gempa yang paling besar telah menyebabkan 2.760 rumah rusak. Jumlah rumah yang rusak itu datanya masih mungkin bertambah. Hal ini mengingat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih terus melakukan pendataan. Sebanyak 2.760 unit rumah rusak itu rinciannya 291 rumah rusak berat (RB), 575 rusak sedang (RS), dan 1.894 rusak ringan (RR). Kabupaten Lebak adalah daerah yang paling banyak terdapat kerusakan bangunan rumah karena posisinya berdekatan dengan pusat gempa. Selain itu juga terdapat kerusakan bangunan lainnya meliputi tujuh unit fasilitas peribadatan, dua unit fasilitas kesehatan, 17 unit fasilitas pendidikan, enam unit kantor atau gedung pemerintahan, dan 63 unit fasilitas umum. BNPB menaksir kerugian mencapai ratusan miliar rupiah (BNPB, 2018).

Permasalahan Mitra

Kecamatan Cikulur di Kabupaten Lebak juga belum memiliki upaya manajemen bencana berbasis masyarakat yang optimal, misalnya belum ada terbentuk Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 sesuai Indikator Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 yaitu:

1. Belum adanya Penilaian Risiko Bencana,
2. Belum adanya Perencanaan Penanggulangan Bencana (PB) di Desa.
3. Belum adanya Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana di Desa
4. Belum adanya Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam Penanggulangan Bencana melalui Pelatihan Kebencanaan pada warga dan perangkat desa,
5. Belum adanya Pemaduan Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Desa
6. Belum adanya Legalisasi Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan dari permasalahan mitra, tim pengusul tertarik untuk membentuk inovasi berbasis masyarakat berupa Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Lebak yang inisiasi awal Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Cikulur. Tujuan dari kegiatan adalah untuk membentuk Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Lebak berbasis masyarakat agar siap dalam menghadapi bencana. Solusi permasalahan adalah sebagai berikut,

1. Bersama dengan perangkat desa melakukan Penilaian Risiko Bencana,

Dalam mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana, para pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di desa/kelurahan sasaran. Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti misalkan HVCA (Hazard, Vulnerability and

Capacity Assessment), yang dikembangkan oleh Palang Merah Indonesia. Perangkat-perangkat pengkajian risiko yang dapat digunakan dalam pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana akan dirinci lebih lanjut dalam panduan pelaksanaan yang lebih teknis.

2. Bersama dengan perangkat desa melakukan Perencanaan Penanggulangan Bencana (PB) di Desa.

Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB Des/Kel) merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah, dalam lingkup desa/kelurahan. Konsep RPB Des/Kel ini mengadopsi konsep RPB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 6 ayat (4) BNPB, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten/Kota di setiap tingkatnya wajib menyusun rencana penanggulangan bencana. Menurut pasal 6 ayat (5) rencana penanggulangan bencana tersebut berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Konsep ini diadopsi di desa/kelurahan, menjadi RPB Des/Kel, berlaku selama 5 (lima) tahun seperti Renas PB dan RPB Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama masyarakat, karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya. Agar pelaksanaan RPB dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus

ada payung hukum pelindung berupa Peraturan Desa atau perangkat lain yang setingkat di kelurahan. Peraturan ini merupakan bentuk kesepakatan politik di tingkat desa/kelurahan, yang direpresentasikan oleh para penyusun, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa atau institusi serupa di kelurahan. Salah satu nilai strategis yang dapat dicapai dengan RPB dalam bentuk Perdes adalah integrasi isu kebencanaan ke dalam RPJM Desa.

3. Bersama dengan perangkat desa membentuk Forum Penanggulangan Bencana

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, penting menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, perlu ada keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam kepengurusan. Ketiga, perlu dijamin agar forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Forum PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup dan status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin kerjasama dan hubungan

kelembagaan yang baik dengan pemerintahan desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, Forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya. Selain Forum PRB Desa/Kelurahan, dapat pula dibentuk Tim Siaga Bencana Masyarakat. Tim

ini akan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat normal tim ini dapat menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Anggota tim ini dapat saja berasal dari anggota Forum PRB Desa/Kelurahan, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi relawan bencana. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dan Tim Siaga Bencana Masyarakat akan diatur secara lebih rinci melalui pedoman pelaksanaan yang akan segera diterbitkan.

4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam Penanggulangan Bencana melalui Pelatihan Kebencanaan pada warga dan perangkat desa

Pengembangan

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat terlaksana dengan baik, kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah desa-kelurahan dalam isu keorganisasian dan pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian akan diberikan dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalatih di lapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat, dan topik-topik terkait lainnya. Peningkatan kapasitas dalam isu PRB akan meliputi pelatihan-pelatihan dalam Pemetaan Ancaman, HVCA atau Penilaian Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas PMI, metode-metode PRA (Participatory

Rural Appraisal) atau Penilaian Pedesaan Partisipatif, dan metode-metode serupa lainnya yang dibutuhkan. Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.

5. Musyawarah dengan perangkat desa melakukan Pemaduan Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Desa

Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB Des/Kel) program diharapkan juga mendorong pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa. Bila berdiri sendiri, RPB kemungkinan sulit untuk mendapatkan pendanaan, karena harus bersaing dengan program-program pembangunan desa lainnya. Oleh karena itu, selain menyusun RPB Des/Kel, Forum PRB Desa diharapkan juga mendorong masuknya aspek-aspek dalam RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga RPJMDes juga mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana. Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes, yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program PRB akan mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat. Untuk kelurahan hal serupa juga dapat diterapkan, yakni memadukan program-program PRB ke dalam perencanaan di kecamatan.

6. Legalisasi Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19.

4. METODE PELAKSANAAN

Metode Pendekatan

Berikut metode pendekatan berbagai kegiatan:

1. Bersama dengan perangkat desa melakukan Penilaian Risiko Bencana melalui tiga komponen, yaitu penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti misalkan HVCA (*Hazard, Vulnerability and Capacity Assessment*).
2. Bersama dengan perangkat desa melakukan Perencanaan Penanggulangan Bencana (PB) di Desa, melalui penyusunan rencana kegiatan penanggulangan bencana. Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan perangkat desa yaitu, Kepala Desa, Puskesmas, Kepala RW dan RT.
3. Bersama dengan perangkat desa membentuk Forum Penanggulangan Bencana. Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan perangkat desa yaitu, Kepala Desa, Puskesmas, Kepala RW dan RT.
4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam Penanggulangan Bencana melalui Pelatihan Kebencanaan pada warga dan perangkat desa. Metode yang digunakan adalah melalui Seminar dan Simulasi Kebencanaan.
5. Musyawarah dengan perangkat desa melakukan Pemaduan Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Desa. Metode yang digunakan adalah Musyawarah Rencana Pembangunan bersama dengan perangkat desa yaitu, Kepala Desa, Puskesmas, Kepala RW dan RT.

6. Legalisasi Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19.

Khalayak Sasaran Kegiatan PKM

Khalayak sasaran kegiatan PKM adalah:

1. Kepala Puskesmas Cikulur
2. Kepala RW
3. Kepala RT
4. Puskesmas
5. Ibu PKK

Langkah-Langkah Kegiatan PKM

1. Bersama dengan perangkat desa melakukan Penilaian Risiko Bencana

Dalam mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana, para pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di desa/kelurahan sasaran. Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti misalkan HVCA (*Hazard, Vulnerability and Capacity Assessment*), yang dikembangkan oleh Palang Merah Indonesia. Perangkat-perangkat pengkajian risiko yang dapat digunakan dalam pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana akan dirinci lebih lanjut dalam panduan pelaksanaan yang lebih teknis.

2. Bersama dengan perangkat desa melakukan Perencanaan Penanggulangan Bencana (PB) di Desa.

Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB Des/Kel) merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah

maupun non-pemerintah, dalam lingkup desa/kelurahan. Konsep RPB Des/Kel ini mengadopsi konsep RPB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 6 ayat (4) BNPB, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten/Kota di setiap tingkatnya wajib menyusun rencana penanggulangan bencana. Menurut pasal 6 ayat (5) rencana penanggulangan bencana tersebut berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Konsep ini diadopsi di desa/kelurahan, menjadi RPB Des/Kel, berlaku selama 5 (lima) tahun seperti Renas PB dan RPB Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama masyarakat, karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya. Agar pelaksanaan RPB dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus ada payung hukum pelindung berupa Peraturan Desa atau perangkat lain yang setingkat di kelurahan. Peraturan ini merupakan bentuk kesepakatan politik di tingkat desa/kelurahan, yang direpresentasikan oleh para penyusun, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa atau institusi serupa di kelurahan. Salah satu nilai strategis yang dapat dicapai dengan RPB dalam bentuk Perdes adalah integrasi isu kebencanaan ke dalam RPJM Desa.

3. Bersama dengan perangkat desa membentuk Forum Penanggulangan Bencana.

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, penting menghadirkan dan menyuatkan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, perlu ada keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam kepengurusan. Ketiga, perlu dijamin agar forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Forum PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup dan status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintahan desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, Forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya. Selain Forum PRB Desa/Kelurahan, dapat pula dibentuk Tim Siaga Bencana Masyarakat. Tim ini akan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat normal tim ini dapat menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Anggota tim ini dapat saja berasal dari anggota Forum PRB Desa/Kelurahan, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi relawan bencana. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dan Tim Siaga Bencana Masyarakat akan diatur secara lebih terinci melalui pedoman pelaksanaan yang akan segera diterbitkan.

4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam Penanggulangan Bencana melalui Pelatihan Kebencanaan pada warga dan perangkat desa

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat terlaksana dengan baik, kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah desa-kelurahan dalam isu keorganisasian dan pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian akan diberikan dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalah di lapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat, dan topik-topik terkait lainnya. Peningkatan kapasitas dalam isu PRB akan meliputi pelatihan-pelatihan dalam Pemetaan Ancaman, HVCA atau Penilaian Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas PMI, metode-metode PRA (Participatory Rural Appraisal) atau Penilaian Pedesaan Partisipatif, dan metode-metode serupa lainnya yang dibutuhkan. Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.

5. Musyawarah dengan perangkat desa melakukan Pemanduan Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Desa

Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB Des/Kel) program diharapkan juga mendorong pemanduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa. Bila berdiri sendiri, RPB kemungkinan sulit

untuk mendapatkan pendanaan, karena harus bersaing dengan program-program pembangunan desa lainnya. Oleh karena itu, selain menyusun RPB Des/Kel, Forum PRB Desa diharapkan juga mendorong masuknya aspek-aspek dalam RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga RPJMDes juga mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana. Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes, yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program PRB akan mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat. Untuk kelurahan hal serupa juga dapat diterapkan, yakni memadukan program-program PRB ke dalam perencanaan di kecamatan.

6. Legalisasi Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19.

Legalisasi Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 melalui BPBD Provinsi Banten.

Keberlangsungan Kegiatan PKM

Setelah Legalisasi Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Sumurbandung dan Sukaharja. Perangkat desa melakukan hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan

Rencana PB dan Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan perlu diimplementasikan oleh seluruh warga. Untuk itu dibutuhkan pendanaan dan alokasi sumber daya yang memadai. Hal ini akan diatur lebih lanjut melalui pedoman yang akan disusun.

2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat. Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan kapasitas warga, serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian.

Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, juga frekuensinya dapat lebih banyak daripada evaluasi. Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program yang membantu mengarahkan pelaksanaan program sesuai perencanaan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran/hasil-hasil program sesuai dengan indikator atau target yang direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa implementasi program, setidaknya setiap tahun sekali. Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran (*lessons learned*) dari pelaksanaan program.

HASIL

1. Langkah awal kegiatan yaitu penyampaian kegiatan kepada Kepala Puskesmas Cikukur tentang agenda pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di Kecamatan

Cikukur. Kegiatan pengabdian masyarakat yaitu tentang Desa Tangguh Bencana. Puskesmas Kecamatan Cikukur sudah mempunyai struktur organisasi yaitu Tim Gerak Cepat (TGC) yang sudah dipersiapkan untuk menanggulangi bencana.

2. Pembuatan Video Animasi Desa Tangguh Bencana
3. Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 telah berlangsung kegiatan pengabdian masyarakat berupa **Pembentukan Tim Siaga Benvana Berbasis Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Puskesmas Cikukur**. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 10.30-12.00 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan oleh tim pengabdian masyarakat, yaitu Ibu Fathinah Rangauni Hardy, SKM, M.Epid, Ibu Rafiah Maharani Pulungan, SKM, MKM, dan Ibu Putri Permatasari, SKM, MKM selaku dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana UPN Veteran Jakarta, Ahid Nur Hidayati dan Fanny Azzahra Putri selaku mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana UPN Veteran Jakarta. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 28 peserta yang berasal dari petugas puskesmas, dokter, bidan, perawat, ahli gizi dan petugas puskesmas Cikukur. Tujuan dari kegiatan ini adalah terbentuknya tim siaga bencana Puskesmas Cikukur dan terbitnya SK Tim Siaga Bencana Puskesmas Cikukur oleh Kelapa Puskesmas Cikukur sehingga wilayah kerja Puskesmas Cikukur sudah

memiliki upaya manajemen bencana berbasis masyarakat yang optimal.

4. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Puskesmas Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sosialisasi berjalan dengan lancar, dimulai dari MC yang membuka dan memimpin pembacaan doa. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan yang diberikan oleh H. Deden Jaenudin, Amd Kep, S.Sos selaku kepala Puskesmas Cikulur. Selanjutnya kegiatan pemberian materi disampaikan oleh Ibu Fathinah Rangauni Hardy, SKM, M.Epid mengenai topik pembentukan tim siaga bencana berbasis masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Puskesmas Cikulur. Para peserta yang hadir ikut berdiskusi dan memberikan pendapatnya mengenai kondisi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Cikulur. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemberian sertifikat dan kenang-kenangan dari pihak tim pengabdian masyarakat kepada Puskesmas Cikulur. Kegiatan sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan kegiatan workshop tim siaga bencana yang akan dilaksanakan pada Rabu dan Kamis tanggal 23 dan 24 Juni 2021. Pada workshop ini juga akan dibahas lebih lanjut mengenai struktur serta tugas pokok dan fungsi setiap struktur dari Tim Gerak Sepat atau Tim Siaga Bencana Puskesmas Cikulur.
5. Telah dilaksanakan kegiatan *workshop* Tim Siaga Bencana sesi satu yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Juni 2021 pukul 12.30-14.00. Acara ini dilaksanakan secara

daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara ini dihadiri sebanyak 20 peserta yang berasal dari dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kesmas dan ahli gizi kesehatan Puskesmas Cikulur. Kegiatan *workshop* Tim Siaga Bencana termasuk ke dalam satu rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat Pembentukan Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 di Puskesmas Cikulur.

6. Acara ini diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa yang dipandu oleh MC. Berikutnya memasuki ke sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Rafiah Maharani Pulungan, SKM, MKM dengan topik prinsip dasar penanggulangan bencana. Acara workshop sesi pertama berjalan dengan lancar dan interaktif karena beberapa peserta mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab. "Upaya yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam penanganan Covid-19 dan vaksinasi sepertinya belum maksimal karena hasilnya belum mencapai target. Apakah ada masukan dalam pemanfaatan kearifan local seperti apa yang bisa dilakukan agar capaian target bisa terwujud dan meningkat?"- Tanya Ibu Yuyun selaku petugas Puskesmas Cikulur, saat sesi diskusi dimulai. "Untuk hal tersebut kita sebagai tenaga kesehatan memang harus bekerja ekstra untuk terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang masih sulit untuk mendapatkan informasi yang benar. Dilihat dari kondisinya wilayah

daerah Cikulur masih memiliki akses jalan yang menanjak dan berliku-liku sehingga masih ditemukan wilayah yang kesulitan untuk mengakses internet. Maka dari itu kita bisa menggunakan tokoh-tokoh penting yang ada di wilayah tersebut contohnya tokoh agama yang di sanjung, tokoh besar/pemerintahan. Kita bisa bekerja sama dengan tokoh tersebut untuk memberikan contoh yang baik sehingga seluruh masyarakat mau menerima” Ungkap Ibu Rafiah menanggapi pertanyaan dari Ibu Yuyun.

Kegiatan workshop Tim Siaga Bencana sesi dua juga telah terlaksana dengan baik pada Kamis, 24 Juni 2021. Pada sesi ke dua topik yang dibawakan salah satunya , yaitu komunikasi aktif dalam penanggulangan bencana yang dipaparkan oleh Ibu Putri Permatasari, SKM, MKM. Selanjutnya pemaparan materi dilanjutkan oleh Ibu Fathinah Ranggauni, SKM, M.Epid dengan topik pembahasan mengenai struktur dan tupoksi tim siaga bencana. Pada sesi ke dua workshop berjalan kondusif dengan dibukanya sesi diskusi. Para peserta yang hadir aktif bertanya mengenai struktur tim siaga bencana yang tepat dan efektif. Pada akhir acara ketua Puskesmas Cikulur, Bapak H. Deden Jaenudin, Amd Kep, S.Sos mengungkapkan kesan dan pesan mengenai kegiatan sosialisasi dan *workshop* ini. Bapak Deden mengatakan bahwa semoga dari acara ini bisa terbentuk tim siaga bencana yang bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan di wilayahnya dan kerja sama antara Puskesmas Cikulur dengan tim pengabdian masyarakat UPN Veteran Jakarta dapat berjalan baik.

KESIMPULAN

Kegiatan menghasilkan pembentukan Tim Siaga Bencana Pada Masa Pandemi Covid 19 dan Simulasi di Wilayah Kerja Puskesmas Cikulur.

DAFTAR PUSTAKA

1. BNPB. 2012. *Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. BNPB. Jakarta
2. Thomas D. Schneid, and Larry Collins. (2001). *Disaster Management Preparedness*. New York: Lewis Publisher
3. Jon Ingleton (Editor). (2000). *Natural Disaster Management*. England: Tudor Rose
4. Khambali. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Andi Publisher
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). *Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat*. <http://www.bnpb.go.id>.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rencana Nasional Penanganan Bencana 2010-2014. Jakarta; 2009.
7. Indonesia. Undang-Undang RI No.24 Tahun 2007. Penanggulangan Bencana: Jakarta; 2007
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Indeks Rawan Bencana Indonesia. Jakarta: BNPB. Jakarta; 2011.
9. Pan American Health Organization. Bencana Alam Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: EGC; 2006.